

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) TAHUN 2008 KEPADA PENDUDUK MISKIN DI KOTA PADANG**

(Studi di : Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji)

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara*



OLEH :

OVI FADILLA

05 193 080

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009

ABSTRAK

Ovi Fadilla (05193080), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing I, Dr. Azwar, M.Si dan Pembimbing II, Desna Aromaticca, S.AP, M.AP. judul skripsi "Implementasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 kepada Penduduk Miskin di Kota Padang (Studi di : Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji).

Tingginya harga minyak dunia yang mencapai kisaran USD 132 per barrel, membuat pemerintah mengambil langkah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), artinya disini harga dasar BBM ikut meningkat. Kenaikkan harga BBM ini dapat mengakibatkan meningkatnya harga kebutuhan pokok, sehingga daya masyarakat menurun, terutama masyarakat miskin. Upaya pemerintah dalam membantu penduduk miskin yang terkena dampak dari kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan pada Inpres no.3 tahun 2008. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini diberikan pemerintah kepada 19.1 juta rumah tangga sasaran (RTS), dengan jumlah dana sebesar 14.1 triliun. Setiap RTS nantinya akan menerima dana sebesar Rp.100 ribu per bulan. Rumah tangga sasaran yang memperoleh BLT ini adalah yang tergolong kepada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan yang mendekati miskin.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian BLT kepada penduduk miskin di Kota Padang serta untuk mengetahui faktor-faktor tidak tercapainya tujuan kebijakan pemberian BLT kepada penduduk miskin di Kota Padang. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards. Beliau mengemukakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Penduduk Miskin di Kota Padang ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik. Kedua, sumber daya masih kurang memadai baik dari segi staf atau pelaksana yang memiliki keahlian maupun dari segi dana. Ketiga, disposisi, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pelaksana dan keempat struktur birokrasi terlalu panjang, sehingga melemahkan pengawasan dan kebijakan ini menjadi tidak tepat sasaran. Dengan demikian implementasi kebijakan BLT ini masih belum berjalan dengan baik. Masih ditemukan banyak kelemahan dari kebijakan ini diantaranya : validasi data, yaitu perbedaan data BPS dengan kondisi dilapangan mengenai jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLT, kebijakan BLT kepada penduduk miskin ini hanya bersifat sementara sehingga dinilai kurang efektif, dan mengajarkan masyarakat untuk tidak produktif dan lain sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tingginya harga minyak dunia yang mencapai kisaran USD 132 per barrel, membuat pemerintah mengambil langkah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi defisit pada APBN. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah, apabila harga minyak mencapai rata-rata USD 120/barrel maka subsidi BBM mencapai lebih dari Rp. 200 Triliun. Sementara itu di dalam UU No. 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2008, ditetapkan batas maksimal anggaran subsidi BBM sebesar 135,1 Triliun, artinya pada kondisi saat ini subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat telah melebihi kapasitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang¹. Alasan lain yang dikemukakan pemerintah adalah, penikmat subsidi yang diberikan merupakan masyarakat dengan pendapatan menengah keatas. Diperkirakan sekitar 72 persen dari subsidi BBM dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, sementara masyarakat bawah hanya menikmati 28 persen dari subsidi tersebut².

¹<http://www.dgtl.esdm.gm.id/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=242>, tanggal 29 Juni 2008, pukul 20.00 WIB

²http://www.freelists.org/post/list_indonesia/ppindia-Kenapa-Kenaikkan-BBM-Ditolak.2, tanggal 26 November 2008, pukul 16.00 WIB

Pengamat ekonomi memprediksi, kenaikan harga BBM ini akan menambah angka kemiskinan sebanyak 15 juta orang dari angka sebelumnya yang berkisar 37 sampai 39 juta orang. Fenomena diatas mengindikasikan, kebijakan pengurangan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia³.

Kemiskinan masih menjadi isu utama yang masih belum ada penyelesaiannya. Pada tahun 2005 penduduk miskin berjumlah 35,10 juta jiwa, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Fluktuasi angka kemiskinan ini berlanjut pada tahun 2006 dengan kembali meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 39,05 juta⁴.

Upaya pemerintah dalam membantu penduduk miskin yang terkena dampak dari kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan pada Inpres no.3 tahun 2008. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini diberikan pemerintah kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS), dengan jumlah dana sebesar 14,1 triliun. Setiap RTS nantinya akan menerima dana sebesar Rp.100 ribu per bulan. Rumah tangga sasaran yang memperoleh BLT ini adalah yang tergolong kepada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan yang mendekati miskin. Program BLT ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu, tahap pertama (periode Juni - Agustus),

³ Singgalang, *Menghitung Dampak Harga BBM*, 25 Mei 2008, hal 4

⁴ <http://www.google.com>, diakses tanggal 12 Desember 2007, pukul 11.30 WIB

setiap RTS menerima dana sebesar Rp. 300 ribu. Tahap kedua (periode September - Desember), setiap RTS menerima dana sebesar Rp. 400 ribu.

Kebijakan ini telah pernah dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2006, dimana jumlah bantuan yang diberikan sama, yakni sebesar Rp. 100.000 untuk masing – masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) . Program ini masih banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam hal pendataan kemiskinan, terdapat ketidakvalidan data antara versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan fakta di lapangan. Banyak warga yang miskin tidak terdata sementara warga yang tidak masuk sama sekali dalam kriteria miskin bisa mengakses BLT, artinya kebijakan ini dinilai masih belum efektif. Selain itu kebijakan ini tidak mampu mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi angka kemiskinan tersebut malah bertambah, serta tidak adanya perubahan kehidupan masyarakat yang mendapat bantuan BLT.

Oleh karena itu banyak kalangan yang menyatakan, program BLT ini tidak kondusif, tidak mendidik rakyat menjadi produktif, karena dapat dipastikan rakyat akan bergantung kepada bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga mereka akan menjadi malas untuk bekerja. Program BLT ini merupakan kebijakan jangka pendek. Semestinya dana BLT tersebut digunakan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur pedesaan yang melibatkan peran serta masyarakat miskin sebagai pekerjanya, sehingga mereka mendapat bayaran dari pekerjaan itu⁵.

⁵ Singgalang, *BLT Ajari Rakyat Meminta-minta*, 19 Mei 2008, halaman 1 dan 11

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Secara umum pendistribusian dana kepada masyarakat dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ditemukan banyak kelemahan dari kebijakan ini diantaranya : validasi data, yaitu perbedaan data BPS dengan kondisi dilapangan mengenai jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin ini hanya bersifat sementara, dan mengajarkan masyarakat untuk tidak produktif dan lain sebagainya.

Selain itu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi masih belum terlaksana dengan baik seperti :

1. Komunikasi

Pada pelaksanaan kebijakan BLT ini komunikasi antara para pembuat kebijakan dengan para pelaksana sudah cukup baik, akan tetapi antara aparatur pemerintah dengan masyarakat sebagai pemakai kebijakan masih belum berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan BLT ini masih belum memadai, baik dari segi staf yang memiliki keahlian atau pelaksana maupun dari segi dana. Karena berdasarkan hasil temuan dilapangan sebelum kebijakan ini

dilaksanakan para aparatur tidak diberikan pelatihan. Sementara itu baik dana yang diberikan untuk terlaksananya kebijakan ini maupun dana yang diberikan kepada masyarakat tidak cukup.

3. Disposisi

Disposisi ini diartikan sebagai sikap (*attitude*) para pelaksana, watak, karakter, para pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Disposisi ini bisa berbentuk kejujuran, komitmen, kepatuhan, kedisiplinan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan ini masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pelaksan, artinya disini kepatuhan, kejujuran serta komitmen dari aparatur pelaksana dinilai masih sangat kurang.

4. Struktur Birokrasi

Pada kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, struktur birokrasinya terlalu panjang sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan dari pusat ke daerah dan kebijakan ini menjadi tidak tepat sasaran.

Dengan demikian implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai ini masih belum berjalan dengan baik, karena masih ditemukan banyak kendala dalam proses implementasi kebijakan BLT ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Dunn, William N.1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edward, C. George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quartely Press.
- Islamy, Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Gramedia
- _____. 2008. *Public Policy*, Jakarta : PT. Elex Media Kumputindo
- Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta
- P. Robbins, Stephen. 1994, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi Edisi 3*, Jakarta : ARCAN
- Singarimbun, Masri. 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S